

**PEMBERDAYAAN MADRASAH BERBASIS MODAL SOSIAL DI LEMBAGA
PENDIDIKAN MA'ARIF PONOROGO JAWA TIMUR**

¹Moh. Miftachul Choiri, ²Suyata, ³Sumarno
¹STAIN Ponorogo, ^{2,3}Universitas Negeri Yogyakarta
¹miftahch@yahoo.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah: (1) memaparkan proses pemberdayaan madrasah di lingkungan LP Ma'arif Ponorogo Jawa Timur (2) menggali modal sosial yang dimanfaatkan madrasah di lingkungan LP Ma'arif Ponorogo Jawa Timur dalam kegiatan pemberdayaan; (3) menjelaskan kontribusi modal sosial dalam kegiatan pemberdayaan madrasah di lingkungan LP Ma'arif Ponorogo Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian etnografi. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Data yang terkumpul melalui catatan etnografi direduksi dengan analisis domain, analisis taksonomi, analisis komponen dan menemukan tema budaya model analisa Spradley. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Kegiatan pemberdayaan madrasah di lihat dari prosesnya dapat dibedakan menjadi tiga tahapan; a) pembentukan kesadaran; (b) Pengkapasitasan; dan (c) kegiatan pendayaan. (2) Terdapat modal sosial yang beragam pada madrasah di lingkungan LP Ma'arif Ponorogo. Keragaman modal sosial tersebut dapat dibedakan dalam tiga hal; nilai-nilai, jejaring sosial dan kepercayaan (trust) masyarakat. (3) Kontribusi modal sosial dalam pemberdayaan madrasah di lingkungan LP Ma'arif Ponorogo dapat mempengaruhi pencapaian akreditasi, pembentukan budaya organisasi madrasah dan program peningkatan mutu pendidikan.

Kata Kunci: pemberdayaan, modal sosial, madrasah, etnografi, lembaga pendidikan Ma'arif

**THE MADRASAH EMPOWERMENT BASED ON SOCIAL CAPITALS AT
MA'ARIF EDUCATIONAL INSTITUTION OF PONOROGO, EAST JAVA**

¹Moh. Miftachul Choiri, ²Suyata, ³Sumarno
¹STAIN Ponorogo, ^{2,3}Universitas Negeri Yogyakarta
¹miftahch@yahoo.com

Abstract

The aims of this study are: (1) to describe the process of madrasah empowerment at Ma'arif Educational Institution (EI) of Ponorogo, East Java; (2) to explore a variety of social capitals utilized by Ma'arif EI of Ponorogo, East Java, in empowerment activities; and (3) to explain the contributions of social capitals in madrasah empowerment activities at Ma'arif EI of Ponorogo, East Java. This study was an ethnographic study employing a qualitative approach. It was conducted through a stage of data collection by means of interviews, observations and documentations. The data collected through ethnographic records were reduced by carrying out domain analysis, taxonomy analysis, and component analysis and finding out cultural themes using Spradley's analysis model. The results of the study are as follows. (1) Madrasah empowerment activities at Ma'arif Educational Institution of Ponorogo in terms of the process can be distinguished into three stages, namely: (a) consciousness formation, (b) capacity building, and (c) empowerment activities. (2) There are a variety of social capital at the madrasah in Ma'arif EI of Ponorogo. The diversity of social capital can be differentiated in three ways: values, social networks and trust of communities. (3) The contribution of social capital in the empowerment of madrasah at Ma'arif EI of Ponorogo may affect the achievement of accreditation, the formation of madrasah organizational culture, and the program of upgrading the quality of education.

Keywords: empowerment, social capital, madrasah, ethnography, Ma'arif EI

PENDAHULUAN

Pendidikan sebagai proses perubahan, memerlukan keterlibatan banyak komponen. Kepala sekolah, para guru, tenaga kependidikan, tokoh masyarakat dan berbagai instansi terkait merupakan elemen penting dalam praksis pendidikan dalam sebuah institusi. Kombinasi berbagai komponen pendidikan yang dirancang dalam sebuah jaringan sosial pada level kelembagaan, akan memberikan kontribusi bagi keberdayaan lembaga pendidikan. Oleh sebab itu, untuk merancang pendidikan yang memberikan manfaat bagi masyarakat, tidak bisa menggunakan paradigma, satu kebijakan untuk semua lembaga pendidikan. Karena masing-masing lembaga pendidikan mempunyai ciri khas, potensi yang berbeda-beda, problem yang berbeda dan kemampuan yang berbeda dalam memecahkan masalah yang dihadapinya.

Menurut istilah Zamroni (2007), sekolah memiliki latar belakang dan potensi masing-masing, yang menyebabkan tidak mungkin dilaksanakan “*one size fits for all policies*”. Artinya, tidak ada satupun formula manjur yang dapat dipakai sebagai obat mujarab untuk memecahkan problem yang dihadapi oleh masing-masing lembaga pendidikan. Sebagai contoh, madrasah sebagai sub Sistem Pendidikan Nasional mempunyai problem yang berbeda dengan problem yang dihadapi oleh sekolah pada umumnya, juga begitu sebaliknya problem yang dihadapi sekolah juga tidak sama dengan yang dihadapi oleh madrasah pada umumnya.

Lahirnya era otonomi pendidikan di Indonesia, memberikan harapan baru bagi terjadinya perubahan dalam praksis pendidikan. Di antara perubahan dalam praksis pendidikan tersebut adalah adanya kebijakan baru tentang tata kelola dalam dunia pendidikan yang sentralistik menuju ke arah desentralistik. Kebijakan desentralistik ditandai dengan adanya pemberian ruang gerak bagi tumbuhnya demokratisasi dan partisipasi berbagai lapisan masyarakat dalam mengawal pelaksanaan pendidikan.

Tilaar (2009, pp. 76-77) memaknai desentralisasi pendidikan sebagai upaya untuk memperkuat dasar pendidikan pada tingkat *grass-root* sesuai dengan kebhinekaan yang dimiliki masyarakat Indonesia. Dengan kata lain desentralisasi pendidikan merupakan se-

buah upaya untuk mengembalikan pendidikan kepada *stakeholder* yaitu masyarakat sendiri. Pendidikan perlu dikelola secara otonom, agar masyarakat dapat secara langsung ikut bertanggungjawab atas keberadaan dan keberlangsungan lembaga pendidikan yang dimilikinya. Pendidikan perlu dikembalikan kepada masyarakat, baik peran maupun fungsinya. Sebagai contoh peran sekolah sebagai lembaga konservasi budaya, sekolah memiliki kewajiban untuk menjaga dan melestarikan budaya suatu masyarakat dengan cara mempengaruhi peserta didik dengan nilai-nilai sosial yang berlaku di masyarakatnya.

Untuk mengarahkan seberapa keterlibatan *stakeholders* dalam otonomi lembaga pendidikan di Indonesia diperlukan pemikiran kritis. Menurut Nuryatno (2008, p.6) dilihat dari perspektif pendidikan kritis, sekolah diyakini dapat memainkan peranan penting dalam membentuk kehidupan politik dan kultural sebuah masyarakat. Sebagai media yang digunakan untuk menyiapkan bentuk-bentuk kehidupan sosial tertentu, sekolah harus dipahami bukan sekedar sebagai tempat untuk transformasi ilmu pengetahuan, tetapi sebagai tempat pembudayaan nilai-nilai positif yang berkembang dalam suatu masyarakat. Proses pendidikan di sekolah tidak hanya dimaknai lebih dari sekedar persoalan penguasaan teknik-teknik dasar yang diperlukan masyarakat, tetapi diorientasikan pada isu-isu fundamental dan esensial, seperti meningkatkan harkat kemanusiaan, menyiapkan manusia untuk hidup di masyarakat di mana dia berada dan mengubah sistem sosial dengan berpihak kepada kaum marjinal.

Di Indonesia selain ada sistem persekolahan yang dikelola di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, juga terdapat lembaga pendidikan formal yang dikenal dengan istilah madrasah yang dikelola di bawah naungan Kementerian Agama. Secara yuridis, keberadaan dua model pendidikan tersebut tidak ada masalah. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, mendudukan madrasah sejajar dengan sekolah pada umumnya. Namun, kenyataannya masih terdapat diskriminasi terhadap madrasah. Sebagai contoh misalnya, Menteri Dalam Negeri, melalui surat edaran No. 903/3172/SJ tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun anggaran 2005 tertanggal 10

Desember 2004, menghapus pengalokasian anggaran pemerintah daerah kepada sekolah pendidikan Islam (madrasah) dan yayasan di bawah naungan Departemen Agama. Tentu kebijakan ini tidak populer dan terkesan diskriminatif. Karena dapat dipastikan bahwa anggaran pendidikan di Departemen Agama khususnya untuk madrasah tidak sebanding dengan biaya pendidikan yang diberikan kepada sekolah di bawah naungan Departemen Pendidikan Nasional. Oleh karena itu, madrasah dituntut kreatif, dalam memberdayakan dirinya agar dapat memenuhi kepentingan *stakeholdernya*. Diantara bentuk pemberdayaan yang perlu terus didorong adalah bagaimana madrasah dapat memanfaatkan berbagai modal sosial yang telah dimilikinya.

Tilaar (2004, p. 164) menjelaskan bahwa madrasah sebagai lembaga pendidikan yang berciri khas Islam, sangat menarik perhatian dalam rangka melaksanakan cita-cita pendidikan nasional. Hal ini semata-mata bukan karena jumlah peserta didiknya yang signifikan, tetapi karena madrasah memiliki semangat yang relevan dengan cita-cita reformasi. Namun demikian, dari segi peranan, madrasah seakan-akan tersisih dari *mainstream* pendidikan nasional. Fakta tentang hal ini diperkuat oleh pendapat Azra (2000, p. 153), secara historis pemerintah kurang responsif terhadap keberadaan madrasah dari segi anggaran dan pembinaan. Tidak adil jika pemerintah menuntut masyarakat terlibat aktif untuk mengelola pendidikan melalui formula pelibatan *stakeholder*, sementara itu belum banyak kebijakan pemerintah, khususnya pemerintah daerah dalam mengakomodasi perkembangan madrasah.

Sejalan dengan terjadinya otonomi pendidikan di level sistem persekolahan Indonesia, tuntutan reformasi pendidikan juga mengalir deras dalam sistem pendidikan Islam di Indonesia, yang salah satu bentuknya madrasah. Sebagai subsistem pendidikan Islam, madrasah memerlukan penyegaran dan paradigma baru. Menurut Tilaar (2009, p. 77), untuk mendudukkan pendidikan Islam dalam konsep reformasi pendidikan nasional, perlu kiranya melihat makna pendidikan Islam dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Secara historis, pendidikan Islam di Indonesia telah ada sebelum bangsa Indonesia merdeka.

Secara sosiologis, hampir sebagian besar madrasah lahir diprakarsai oleh masya-

rakat untuk memenuhi kebutuhan pendidikan mereka. Karena alasan tertentu, misalnya tidak diterima di sekolah negeri atau madrasah negeri, maka sebagian besar komunitas muslim, menyekolahkan anak-anak mereka di madrasah swasta. Jumlah madrasah swasta di Indonesia hampir 92 persen, sementara yang negeri hanya 8 persen (Wahid, 2002, pp. 267-268). Sebagai kekuatan ekonomi, daya serap anak-anak yang sekolah di madrasah cukup memadai. Sebagai contoh, pada tahun 2000, anak-anak yang sekolah di Madrasah Ibtidaiyah sebesar 2.894.128 atau sekitar 10,5% dari keseluruhan anak yang sekolah di tingkat dasar, sedangkan di Madrasah Tsanawiyah daya serap anak sekitar 1.823.135 atau 12,9% dari keseluruhan murid SLTP yang berjumlah 9.419.521.

Sebagai kekuatan politik, pada beberapa periode terakhir, banyak lulusan madrasah yang dapat meneruskan jenjang perguruan tinggi sehingga mereka dapat memperoleh akses yang lebih luas untuk berkiperah di dunia usaha, politik dan birokrasi. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari kebijakan pemerintah memasukkan madrasah sebagai sub Sistem Pendidikan Nasional sehingga kedudukan madrasah dan sekolah hampir sejajar walaupun belum tentu sama. Sebagai lembaga pendidikan yang mempunyai komitmen untuk melestarikan budaya, transformasi nilai-nilai yang membentuk kepribadian yang kuat, telah ditunjukkan madrasah. Hal ini ditegaskan oleh Mas'ud (2002, p. 31) bahwa pesantren sebagai induk madrasah cukup kuat untuk menghadapi adanya hegemoni kekuasaan. Hal ini ditunjukkan saat penjajah semakin menindas, saat itu pula perlawanan murid di madrasah semakin keras.

Menurut Mahfud (1994, pp. 278-279), terdapat pertanyaan besar yang harus dijawab madrasah, apakah madrasah ingin *survive* atau terlindas oleh perubahan? Jawaban tersebut tergantung pada kemampuan madrasah mengembangkan diri, mengidentifikasi masalah sekaligus memecahkannya. Terdapat 3 (tiga) masalah yang dihadapi madrasah, antara lain: 1) masalah identitas madrasah dalam hubungannya dengan karakteristik dan kemandiriannya terhadap lembaga-lembaga lainnya di masyarakat, 2) masalah jenis pendidikan yang dipilih sebagai alternatif dasar yang akan dikelola untuk menciptakan suatu sistem pendidikan yang masih

memiliki titik tekan keagamaan tetapi pengetahuan umum tetap diberi porsi yang cukup sebagai kebutuhan mengantisipasi perkembangan aspirasi masyarakat dan 3) masalah sumberdaya internal yang ada bagi pengembangan madrasah di masa yang akan datang.

Dalam meningkatkan mutu pendidikan di madrasah tidak mungkin digunakan satu formula untuk semua madrasah. Ditegaskan oleh Zamroni (2008, p. 2) sekolah memiliki latar belakang dan potensi yang berbeda-beda dan bahkan masalah yang berbeda-beda, di mana hal ini menyebabkan tidak mungkin dilaksanakan satu kebijakan yang sama. Kebijakan dan upaya peningkatan mutu sekolah harus memiliki fleksibilitas yang tinggi. Meskipun, tetap saja harus ada dimensi kebijakan dan upaya yang bersifat imperatif untuk semua sekolah. Paradigma yang demikian juga berlaku bagi perbaikan mutu pendidikan di madrasah.

Dalam konteks kualitas dan kondisi lembaga pendidikan yang beragam ini, lahirnya kebijakan desentralisasi pendidikan, yang dimaknai sebagai momentum penting bagi madrasah melakukan perbaikan mutu pendidikan dengan melibatkan masyarakat di sekitarnya melalui kegiatan pemberdayaan madrasah. Secara historis, sebagian besar madrasah lahir dari gagasan masyarakat muslim, dimana madrasah tersebut berada. Faktanya sebagian kecil, madrasah yang memanfaatkan secara optimal kekuatan masyarakat pendukungnya sebagai modal sosial untuk kepentingan pemberdayaan di institusinya. Relasi sosial, nilai-nilai kepesantrenan, struktur sosial di mana madrasah berada merupakan modal sosial yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan mutu pendidikan di madrasah.

Pemanfaatan modal sosial sebagai sumber kekuatan dalam perbaikan dan peningkatan mutu pendidikan di madrasah perlu dilakukan secara kritis dan kreatif. Penyadaran tentang kualitas madrasah pada umumnya, peluang yang diperoleh madrasah di tengah-tengah terjadinya dinamika masyarakat Indonesia, apa yang diperlukan madrasah dalam menyambut perubahan masyarakat yang dinamis, bagaimana kualitas *output* yang dihasilkan madrasah dan bagaimana kontribusi madrasah dalam Sistem Pendidikan Nasional, merupakan berbagai problem yang perlu dijawab madrasah. Oleh karena itu, untuk memahami berbagai persoalan tersebut,

madrasah perlu diberdayakan dan ditransformasikan kesadaran kritisnya.

Kesadaran kritis sebagai paradigma, mendorong tumbuhnya kesadaran untuk melakukan usaha-usaha mengemansipasi diri dari ketidakberdayaan, perlakuan yang tidak adil, keterbelakangan dan alienasi yang dihasilkan oleh hubungan-hubungan kekuasaan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Giroux dalam Nuryatno (2008, p. 28) pemahaman ideologi yang dibangun oleh kelas sosial yang berkuasa untuk melegitimasi dan melanggengkan dominasi, para penguasa menciptakan kesadaran palsu dan mencitrakan sedemikian rupa situasi sosial sehingga seolah-olah tidak terdapat penindasan dan ketidakadilan. Padahal kondisi empiris menunjukkan telah terjadi ketidakseimbangan dan ketidakadilan antar kelompok masyarakat.

Kesadaran kreatif menurut Simmel (2009) mendorong lahirnya kesadaran individu. Simmel dalam Ritzer (2009, p. 179) menyatakan bahwa dalam interaksi sosial, aktor dapat mengambil dorongan eksternal, menjajaknya dan mencoba tindakan yang berbeda, kemudian memutuskan apa yang sebaiknya dilakukan. Karena kapasitas mental yang dimiliki seseorang tersebut, ia sebagai aktor tidak hanya diperbudak oleh faktor eksternal, tetapi juga menciptakan kesadaran internal karena adanya reifikasi terhadap nilai-nilai dan norma yang berlaku di lingkungan hidupnya. Kesadaran yang dimiliki seseorang akan berpengaruh terhadap besar kecilnya interaksi yang akan dilakukannya. Hal ini nampak sepele tetapi pada saat yang lain akan menimbulkan dampak sosial yang besar.

Analisis tentang pembentukan kesadaran sebagai bagian dari konsep pemberdayaan, secara umum dinamika pemberdayaan madrasah dapat dijelaskan melalui beberapa model pemberdayaan. Selama ini terdapat beberapa model pemberdayaan madrasah yang berkembang, antara lain sebagai berikut. Pertama, model madrasah ibtidaiyah “laboratorium”; madrasah ibtidaiyah dijadikan sebagai tempat untuk mengujicobakan dan mengimplementasikan berbagai teori pendidikan dan pembelajaran secara terbatas, misalnya Madrasah Ibtidaiyah Pembangunan, madrasah ibtidaiyah laboratorium milik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

Kedua, model madrasah ibtidaiyah “kemitraan LAPIS (*Learning Assistance*

Program for Islamic Schools) PGMI²; madrasah ibtidaiyah dijadikan sebagai mitra pengembangan berbagai program pendidikan perguruan tinggi Agama Islam yang tergabung dalam sebuah konsorsium perguruan tinggi Agama Islam di Indonesia yang dikelola oleh sebuah NGO Australia yang bernama LAPIS (*Learning Assistance Programs for Islamic Schools*). Model pemberdayaan ini, mempunyai berbagai kegiatan, diantaranya adalah membuat jejaring antar madrasah ibtidaiyah dalam sebuah wilayah kabupaten, menghubungkan antara madrasah ibtidaiyah dengan perguruan tinggi agama Islam yang mempunyai program pendidikan strata satu Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) dan kegiatan pengkapisitasan madrasah ibtidaiyah, meliputi pengkapisitasan pengelola madrasah ibtidaiyah (kepala madrasah, komite madrasah dan tenaga administrasi madrasah), pengkapisitasan guru madrasah ibtidaiyah dan simulasi implementasi manajemen berbasis madrasah (MBM) dan ketiga, madrasah ibtidaiyah model; madrasah ibtidaiyah dijadikan model pemberdayaan dan peningkatan mutu pendidikan bagi madrasah ibtidaiyah lainnya, misalnya Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Malang.

Strategi perbaikan kualitas pendidikan madrasah belum berhasil optimal. Hal ini disebabkan oleh masih banyak madrasah yang belum berdaya dan mengalami masalah besar, sehingga sering terdengar ungkapan yang berkembang di kalangan madrasah sendiri dengan istilah *laa yahya wa la yamuutu* (tidak hidup juga tidak mati).

Kondisi kelembagaan madrasah yang demikian, jika dianalisa menurut pendapat Kotter (1996, pp. 101-103), mengapa banyak lembaga tidak berdaya? Setidaknya terdapat empat penyebab kebanyakan organisasi atau lembaga tidak berdaya, antara lain; pertama, struktur formal menjadikannya sulit untuk bertindak; kedua, tindakan para pimpinan organisasi yang kurang visioner dalam mengarahkan organisasi untuk mengimplementasikan visi baru; ketiga, lembaga atau organisasi miskin ketrampilan yang dibutuhkan untuk menghadapi perubahan; dan keempat, sistem personil dan informasi yang dimiliki organisasi atau lembaga tidak ada delegasi sehingga menjadikannya sulit untuk bertindak. Jika dilihat dari analisa yang dikembangkan Kotter (1996) tersebut, maka sebagian besar madra-

sah di kabupaten Ponorogo sedang menghadapi empat masalah besar yaitu; problem struktur, skill, sistem dan supervisor.

Terdapat alternatif lain yang dapat dipilih madrasah untuk keluar dari problem yang dihadapinya. Alternatif tersebut adalah kegiatan pemberdayaan madrasah dengan memanfaatkan modal sosial. Menurut Grootaert dalam Mudiarta (2009, p. 3) bahwa modal sosial merupakan satu alternatif yang dapat digunakan untuk mengurai masalah kemiskinan, kesehatan dan pendidikan. Ditegaskan oleh Mudiarta (2009) bahwa peran yang dimainkan oleh jaringan sosial dalam pembangunan masyarakat tidak sama di setiap wilayahnya. Hal ini menunjukkan bahwa modal sosial juga bervariasi antar wilayah, demikian juga dampak yang ditimbulkan dari modal sosial juga dapat berbeda-beda. Dengan demikian baik jaringan sosial maupun modal sosial sangat mungkin mempunyai *local indigenous* atau mengandung dimensi kelokalan dan tidak dapat digeneralisasikan.

Terdapat kasus pemberdayaan sekolah melalui berbagai model pemberdayaan, antara lain model sekolah alternatif dan pendidikan formal alternatif. Kasus pemberdayaan yang pertama adalah kasus sekolah alternatif model Qaryah Thayyibah di Salatiga. Sekolah alternatif Qaryah Thayyibah didirikan oleh Bahruddin, lulusan Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang. Pada lembaga pendidikan ini peserta didiknya diajarkan tentang makna penting membangun kesadaran berkreasi. Paradigma pendidikan yang dikembangkan di Qaryah Thayyibah adalah desa yang berdaya. Dalam pandangan Bahruddin (2008, p. 161) pendidikan dalam perspektif ini tidak hanya ditujukan untuk memintarkan individu-individu dalam masyarakat tetapi untuk membangun sistem sosial yang demokratis, mengembangkan sistem ekonomi yang berkeadilan berbasis pada kelestarian dan penguatan daya dukung sumber daya alam.

Oleh sebab itu, model pendidikan di Qaryah Thayyibah memanfaatkan sumber daya lokal baik untuk pendanaan maupun pelaksanaan proses pembelajaran. Untuk pendanaan, dana operasional awal untuk keberlangsungan sekolah Qaryah Thayyibah menggunakan rata-rata uang saku anak usia sekolah SMP-SMA berkisar di angka Rp3.000,00. Untuk pelaksanaan proses pembelajaran, pendiri Qaryah Thayyibah meminta bantuan

kepada warga sekitar tanpa digaji. Di antara mereka ada yang membantu mengajar Matematika, bahasa Inggris dan komputer. Dari lembaga ini lahir generasi muda yang kreatif dan berpikiran dewasa. Contohnya bisa dilihat ketika pada tahun 2006, sebagian peserta didik angkatan pertama SMP alternatif Qaryah Thayyibah mendapat tawaran untuk masuk di SMA 1 Salatiga karena prestasi yang mereka capai. Padahal SMA 1 Salatiga merupakan sekolah negeri yang mempunyai program sekolah standar internasional dan paling favorit di Salatiga (Bahruddin, 2008).

Kasus yang kedua adalah pendidikan formal alternatif di SD Mangunan Yogyakarta. SD Mangunan didirikan oleh Romo Y.B. Mangunwijaya. Menurut Mangunwijaya (2008, p. 191) pendidikan mengantar dan menolong peserta didik untuk mengenali dan mengembangkan potensi-potensi dirinya agar menjadi manusia yang mandiri, dewasa dan utuh; manusia yang merdeka sekaligus peduli dan peduli dengan sesama manusia lain dalam usaha meraih derajat kemanusiaan yang semakin sejati dengan jati diri yang semakin utuh, harmonis dan integral. Peserta didik di SD Mangunan diajarkan kurikulum layaknya sekolah dasar pada umumnya. Namun kurikulum tersebut diolah menjadi kegiatan belajar mengajar yang sesuai untuk kaum miskin di jenjang sekolah dasar. Pengolahan kurikulum dilakukan oleh para guru secara kreatif dan disesuaikan dengan kebutuhan dan minat anak miskin, sesuai dengan teori taraf perkembangan anak Jean Piaget & L.S. Vigotsky, mempertimbangkan filsafat pendidikan Socrates, Paulo Freire dan Ivan Illich, kearifan Ki Hajar Dewantoro dan pembiayaan pendidikan murah dengan memanfaatkan kertas dan barang-barang bekas (Forum Mangunwijaya, 2008).

Peserta didik di SD Mangunan Yogyakarta, yang sebagian besar berasal dari kalangan kurang mampu, diajari tentang isi kurikulum pendidikan formal alternatif anak kaum miskin berupa ilmu-ilmu kehidupan yang harus dimiliki setiap orang agar benar-benar mengelola dan memaknai kehidupan dan bukan sekedar siap-pakai dapat imbalan. Secuil kisah bagaimana murid kelas V dan VI SD Mangunan bekerja sama untuk mengumpulkan pasir untuk disumbangkan ke sekolahnya. Para murid di kelas V dan VI secara diam-diam dan tanpa diperintah oleh gurunya, setiap sore hari mereka berusaha mencari

pasir di sungai dekat SD Mangunan hingga terkumpul satu gerobak pasir. Mereka memasukkan pasir ke dalam gerobak secara bergantian, kemudian sambil bersenda gurau mereka mendorong gerobak penuh pasir tersebut ke dalam sekolah. Tanpa sepengetahuan para guru di SD Mangunan, para murid kelas V dan VI menyumbangkan pasir hasil kerja sama mereka untuk renovasi kelas yang sudah reot agar bisa digunakan untuk belajar kembali. Kisah ini membuat warga di sekitar SD Mangunan haru dan kagum atas kesadaran para murid untuk mencari pasir secara sukarela dan kemudian disumbangkan ke sekolahnya (Forum Mangunwijaya, 2008).

Membandingkan dua kasus pemberdayaan yang terjadi di sekolah alternatif Qaryah Thayyibah dan SD Mangunan Yogyakarta, di lingkungan Lembaga Pendidikan (LP) Ma'arif kabupaten Ponorogo, terdapat sejumlah madrasah yang tergabung dalam wilayah pembinaannya, melakukan berbagai kegiatan pemberdayaan. Pada level pendidikan dasar terdapat madrasah ibtidaiyah (MI) Ma'arif Polorejo, melakukan kegiatan pemberdayaan dengan mengembangkan jaringan sosial melalui lembaga konsorsium madrasah ibtidaiyah bekerja sama dengan LSM Australia (LAPIS Australia) melalui program madrasah binaan STAIN Ponorogo. Pada level pendidikan menengah pertama, di lingkungan LP Ma'arif Ponorogo terdapat madrasah tsanawiyah (MTs.) Ma'arif Mungging yang terletak di daerah pinggiran wilayah kabupaten Ponorogo, tepatnya di wilayah kecamatan Pulung melakukan kerja sama dengan SMP Islam Sunan Averus Yogyakarta untuk menyelenggarakan kelas unggulan sebagai "model" peningkatan mutu pendidikan yang dikelolanya. Gagasan kelas unggulan pada lembaga ini, diilhami adanya pemikiran kepala madrasah untuk menampung dan mengembangkan prestasi murid berbakat di daerah pinggiran Ponorogo, khususnya kecamatan Pulung.

Pada level sekolah menengah atas, terdapat madrasah aliyah (MA) Al-Azhar yang terletak di desa Carangrejo kecamatan Sampung. Secara geografis desa Carangrejo berdekatan dengan hutan kayu jati. Sebagian besar penduduk desa ini bekerja pada bidang pertanian dan perkebunan di wilayah hutan jati. Secara historis berdirinya madrasah aliyah Al-Azhar Carangrejo atas usulan masyarakat muslim di desa Carangrejo untuk me-

wadahi anak-anak yang tidak mampu agar tetap bisa memperdalam ilmu agama Islam dan memperoleh akses pendidikan pada jenjang pendidikan tingkat menengah atas. Karena sebagian besar peserta didik di lembaga ini berasal dari kelompok masyarakat yang secara ekonomi memiliki keterbatasan namun mempunyai semangat menekuni dakwah Islamiyah yang kuat. Kehadiran madrasah aliyah (MA) Al-Azhar Karangrejo bagi masyarakat sekitar mempunyai arti penting, terutama untuk memfasilitasi mereka memperoleh jenjang pendidikan menengah atas. Sebagian besar lulusan madrasah aliyah (MA) Ma'arif Al-Azhar Karangrejo yang tidak melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi, mereka lebih memilih menjadi pekerja migran di luar negeri untuk membantu meningkatkan perekonomian orang tua mereka, oleh karena itu di lembaga ini peserta didik dibekali berbagai ketrampilan fungsional melalui kegiatan ekstra kurikuler, seperti mengemudi mobil, menjahit, budi daya ikan lele, budidaya jangkrik, bertani dan sablon.

Berdasarkan pada berbagai alasan tersebut di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Pemberdayaan Madrasah Berbasis Modal Sosial di Lembaga Pendidikan Ma'arif Ponorogo Jawa Timur".

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sedangkan jenisnya etnografi. Pendekatan ini dipilih secara filosofis sesuai dengan karakter data, teknik pengumpulan data dan analisis data yang digunakan. Menurut Emzir (2011, p. 1) penelitian etnografi adalah penelitian yang bermanfaat untuk menemukan budaya yang tersembunyi dalam suatu budaya atau komunitas.

Pemilihan pendekatan ini didasarkan atas sifat kajian, perspektif teoretik, sasaran maupun data penelitian yang diyakini lebih relevan dengan pendekatan kualitatif-etnografi. Alasan lain, mengapa penelitian ini menggunakan etnografi, karena obyek penelitian ini berhubungan dengan kegiatan pemberdayaan madrasah dan modal sosial, yang di dalamnya terdapat proses pembentukan kesadaran melalui internalisasi nilai-nilai melalui pembiasaan dan pembentukan budaya organisasi madrasah yang komunikatif dan nyaman. Selain itu dalam penelitian ini juga

mengungkap budaya madrasah dalam memanfaatkan jaringan sosial yang dimilikinya.

Penelitian ini dilaksanakan di tiga madrasah dalam wilayah binaan LP Ma'arif Ponorogo yaitu madrasah ibtidaiyah (MI) Ma'arif Polorejo Babadan, madrasah tsanawiyah (MTs) Ma'arif Munggung Pulung dan madrasah aliyah (MA) Ma'arif Al-Azhar Karangrejo Sampung. Ketiga lokasi penelitian ini berada di kabupaten Ponorogo namun berada dalam kecamatan yang berbeda.

Subyek penelitian ini terdiri dari kepala madrasah, guru dan anggota komite madrasah yang berada di madrasah ibtidaiyah (MI) Ma'arif Polorejo Babadan, madrasah tsanawiyah (MTs.) Ma'arif Munggung Pulung dan madrasah aliyah (MA) Ma'arif Al-Azhar Karangrejo Sampung Ponorogo. Selain kepala madrasah, guru dan anggota komite madrasah, subyek penelitian ini juga melibatkan ketua LP Ma'arif Ponorogo dan pengurusnya.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara mendalam, pengamatan partisipan dan dokumentasi. Wawancara mendalam digunakan untuk menggali data yang berhubungan dengan kegiatan pemberdayaan yang meliputi tiga tahapan, yaitu: pembentukan kesadaran, pengkapasitasan (*capacity building*) dan pendayaan. Selain itu wawancara mendalam juga digunakan untuk menggali data yang berhubungan dengan modal sosial, yaitu; data tentang nilai-nilai yang dibudayakan di madrasah, pemanfaatan jejaring sosial dalam pemberdayaan madrasah dan kepercayaan (*trust*) masyarakat di sekitar madrasah. Observasi digunakan untuk mengamati pelaksanaan kegiatan pemberdayaan madrasah, baik yang berhubungan dengan internalisasi nilai-nilai maupun dalam kegiatan pengkapasitasan (*capacity building*) sumberdaya madrasah melalui kegiatan workshop maupun pelatihan. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data yang berhubungan dengan profil madrasah, dokumen rencana kegiatan madrasah dan dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan pemberdayaan madrasah maupun dokumen yang berhubungan dengan jaringan sosial.

Analisa data dalam penelitian ini menggunakan analisa etnografi Spradley (2007) yang tahapannya terdiri dari empat langkah; *Pertama*, analisis domain digunakan untuk menjelaskan gambaran umum dan

situasi sosial dari obyek dan subyek sosial dalam penelitian ini yaitu kegiatan pemberdayaan madrasah dan modal sosial. *Kedua*, analisis taksonomi dengan cara menjabarkan domain-domain yang dipilih menjadi lebih rinci untuk mengetahui struktur internal konsep pemberdayaan dan konsep modal sosial. *Ketiga*, analisis komponensial yang digunakan untuk mencari ciri-ciri spesifik pada setiap struktur internal konsep pemberdayaan dan konsep modal sosial yang ada pada madrasah yang menjadi setting dalam penelitian ini dengan mengontraskan antar elemen. *Keempat*, analisis tema budaya dengan mencari hubungan di antara domain yang ada dalam konsep pemberdayaan dan modal sosial yang selanjutnya dinyatakan dalam tema-tema yang sesuai dengan fokus dan sub fokus penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menurut Tarmizi Taher dalam Muhaimin (2005, p.197) dinyatakan bahwa madrasah adalah sekolah umum yang berciri khas agama Islam, yang muatan kurikulumnya sama dengan sekolah nonmadrasah. Sebagai sekolah yang berciri khas agama Islam, kedudukan madrasah dalam sistem pendidikan nasional didudukkan sebagai sub sistem pendidikan nasional. Oleh sebab itu peran dan fungsi pendidikan di madrasah sebagai bagian dari sub sistem pendidikan nasional, mempunyai peran dan fungsi pendidikan yang sama dengan sekolah.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 28 dan No. 29 tahun 1989 dijelaskan bahwa madrasah adalah sekolah umum yang berciri khas agama Islam dan kurikulum madrasah sama dengan kurikulum sekolah plus sesuai dengan ciri khasnya. Hal ini juga dipertegas oleh Ahid (2009, p. 25) bahwa ciri khas madrasah secara formal dinyatakan dalam kurikulum mata pelajaran agama Islam. Mata pelajaran agama Islam di madrasah jumlah jam pelajarannya lebih banyak dibandingkan dengan sekolah.

Sebagai lembaga pendidikan yang mengajarkan nilai-nilai keislaman, menurut Muhaimin (2005, p. 201) madrasah merupakan wahana untuk membina ruh dan praktek hidup keislaman. Oleh sebab itu, madrasah sebagai tempat belajar, di dalamnya perlu dirancang berbagai kegiatan yang dapat membantu, membimbing, melatih serta mengarahkan

peserta didiknya atau lulusannya menjadi muslim yang berkualitas.

Madrasah sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional Indonesia, dihadapkan pada berbagai masalah. Menurut Mahfudh (1994, p. 278) terdapat tiga masalah yang dihadapi madrasah, yaitu; (1) masalah identitas; (2) masalah sumber daya internal dan pemanfaatannya bagi pengembangan madrasah ke depan; dan (3) masalah pengelolaan madrasah.

Oleh karena itu, dalam rangka menngurai masalah yang dihadapi madrasah utamanya masalah sumber daya manusia dan masalah pengelolaan madrasah dapat diupayakan melalui kegiatan pemberdayaan madrasah melalui pemanfaatan modal sosial.

Pemberdayaan Madrasah di Lingkungan LP Ma'arif Ponorogo

Menurut Friedmann dalam Sumodiningrat (2007, p. 27) pemberdayaan muncul dari dua premis mayor yaitu kegagalan dan harapan. Kegagalan yang dimaksud adalah gagalnya upaya pembangunan ekonomi untuk mengentaskan kelompok masyarakat miskin, sedangkan harapan adalah adanya alternatif-alternatif pembangunan dengan memasukkan nilai-nilai demokratis, persamaan gender, persamaan peluang untuk memperoleh pendidikan, mengembangkan diri dan berpartisipasi dalam pembangunan.

Menurut Rappaport dalam Suharto (2009, p. 59) pemberdayaan adalah suatu cara di mana rakyat, organisasi dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai atau berkuasa atas kehidupannya sendiri. Sedangkan menurut Mardikanto & Soebiato (2012, p. 61) pemberdayaan merupakan sebuah proses untuk memperkuat atau mengoptimalkan keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat yang sedang mengalami masalah kemiskinan atau ketidakberdayaan. Oleh sebab itu, menurut John Friedmann dalam Wrihatnolo & Dwidjowijoto (2007, p. 3) pemberdayaan sebagai sebuah proses mempunyai tiga tahapan, sebagai berikut; (1) penyadaran; (2) pengkapasitasan; dan (3) pendayaan.

Mengapa pemberdayaan menjadi penting bagi sekolah? Menurut Danim (2005, p. 184) pemberdayaan sekolah menawarkan banyak keuntungan bagi individu maupun organisasi sekolah. Diantara keuntungan tersebut adalah; (1) memberikan peluang untuk

meningkatkan ketrampilan dan keahlian bagi peningkatan mutu layanan; (2) dapat mendorong munculnya ketrampilan baru dan memberikan beragam pengalaman yang ada; (3) dapat meningkatkan motivasi, rasa berpretasi dan perluasan tugas secara signifikan; (4) dapat meningkatkan etos kerja yang memiliki dampak positif bagi produktivitas; dan (5) dapat mereduksi stres bekerja yang dialami oleh staf sekolah.

Menurut Ouchi (2000, p. 35) pemberdayaan sekolah mempunyai keterkaitan erat dengan cara kepala sekolah membuat keputusan operasional tentang bagaimana cara mengimplementasikan kebijakan pemerintah ke dalam kebijakan sekolah. Terdapat lima pilar pemberdayaan sekolah, sebagai berikut; (1) pemberdayaan sekolah agar menjadi pilihan nyata keluarga; (2) pemberdayaan sekolah dengan 4 kebebasan (pengendalian anggaran, kepegawaian, kurikulum dan pengaturan jadwal); (3) pemberdayaan kepala sekolah agar menjadi kepala sekolah efektif; (4) pemberdayaan sistem persekolahan yang akuntabel; dan (5) pemberdayaan dalam mengelola beban biaya pendidikan.

Terkait dengan proses pemberdayaan yang terjadi di madrasah yang menjadi setting penelitian ini, seperti apa gambarannya? Terdapat 3 madrasah di lingkungan LP Ma'arif Ponorogo yang menjadi subyek dalam penelitian ini, yaitu madrasah ibtidaiyah (MI) Ma'arif Polorejo, madrasah tsanawiyah (MTs) Ma'arif Mungging dan madrasah aliyah (MA) Ma'arif Al-Azhar Carangrejo.

Setting penelitian yang pertama, penelitian ini adalah madrasah ibtidaiyah (MI) Ma'arif Polorejo. Dari hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa pemberdayaan madrasah di lembaga ini melalui 3 proses; (1) pembentukan kesadaran; (2) pengkapasitasan; dan (3) pendayaan. Secara umum, pembentukan kesadaran di MI Ma'arif Polorejo, dipengaruhi dua hal yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dinamika yang berkembang di luar lembaga MI Ma'arif Polorejo yaitu adanya permintaan masyarakat desa Polorejo yang sebagian besar penduduknya bekerja sebagai buruh migran di luar negeri untuk menyediakan pendidikan formal setingkat pendidikan dasar yang berciri khas agama Islam, yang berkualitas dan dapat dijadikan pijakan untuk melanjutkan jenjang

pendidikan di tingkat menengah. Oleh sebab itu, dalam rangka mewujudkan tuntutan masyarakat Polorejo, secara bertahap pimpinan MI Ma'arif Polorejo mewujudkan tuntutan tersebut dengan melakukan perbaikan kualitas pendidikan di MI Ma'arif Polorejo secara berkelanjutan, misalnya melakukan melakukan pembinaan moral peserta didik melalui kegiatan praktek beribadah di lingkungan madrasah. Faktor internal yang mempengaruhi pembentukan kesadaran di madrasah ini adalah kesadaran guru dan kepala madrasah di MI Ma'arif Polorejo untuk mewujudkan visi dan misi madrasah serta pendidikan yang berkualitas. Sebelum muncul kesadaran internal, prestasi akademik maupun non akademik di MI Ma'arif Polorejo stagnan. Akan tetapi setelah muncul kesadaran internal, upaya pemilihan peserta didik berbakat dilakukan, pembinaan peserta didik melibatkan lembaga bimbingan belajar dan bekerja sama dengan pihak lain, maka berbagai prestasi baik akademik maupun non akademik dapat diraih lembaga ini, seperti; Juara I Olimpiade MIPA tingkat kecamatan Babadan, Juara II Olimpiade MIPA tingkat kabupaten, memperoleh nilai tertinggi Ujian Nasional di tingkat kecamatan Babadan, Juara II Medan Galang Tingkat SD/ MI Provinsi Jawa Timur, Juara I Kemah Ma'arif Tingkat Kabupaten, Juara I MTQ, Juara II Lomba Tari Tingkat karesidenan Madiun, Juara II Membaca Puisi Tingkat Kabupaten dan Juara I Lomba Kaligrafi tingkat kecamatan Babadan.

Tahap kedua dalam kegiatan pemberdayaan adalah pengkapasitasan. Pengkapasitasan yang dilakukan di MI Ma'arif Polorejo berhubungan dengan pengkapasitasan sumber daya manusia, pengkapasitasan organisasi dan pengkapasitasan nilai-nilai. Pengkapasitasan sumberdaya manusia meliputi peningkatan kemampuan guru menerapkan strategi pembelajaran aktif, kemampuan guru mengembangkan sumber belajar, kemampuan guru mengembangkan sistem penilaian dan kemampuan guru dalam menyusun RPP. Kegiatan pengkapasitasan sumber daya manusia di MI Ma'arif Polorejo dilakukan melalui kegiatan workshop dan training dengan program kemitraan bersama Program Studi PGMI STAIN Ponorogo bekerja sama dengan LAPIS Australia, bekerja sama dengan konsorsium MI di lingkungan LP Ma'arif Ponorogo dan workshop dan pelatihan yang dilakukan se-

cara mandiri. Kegiatan pengkapisitan organisasi di MI Ma'arif Polorejo dilaksanakan dengan menyusun struktur organisasi madrasah yang sesuai dengan kondisi MI Ma'arif Polorejo dan disertai dengan penjabaran tugas pokok dan fungsi sesuai dengan struktur yang diperlukan. Sedangkan pengkapisitan nilai-nilai di MI Ma'arif Polorejo diupayakan melalui kegiatan pembentukan kultur madrasah melalui kegiatan pembiasaan baik di level guru maupun peserta didik. Di level guru ada kegiatan arisan dan anjang sana secara bergantian ke rumah guru, sedangkan pada level peserta didik ada sholat dhuha dan dhuhur berjamaah, pembiasaan hafalan surat-surat pendek dan doa ma'tsurat sebelum jam belajar dimulai.

Tahap ketiga dalam pemberdayaan adalah pendayaan. Kegiatan pendayaan ini bentuknya riilnya adalah memberikan peluang kepada MI Ma'arif Polorejo merancang dan melaksanakan kegiatan secara mandiri. Dalam hal ini yang dilakukan MI Ma'arif Polorejo adalah melakukan kegiatan peningkatan akreditasi dari nilai B berubah menjadi madrasah yang SSN (Sekolah Standar Nasional).

Setting penelitian yang kedua yaitu madrasah tsanawiyah (MTs) Ma'arif Mungging. Pada lokasi penelitian ini, diperoleh gambaran bahwa pelaksanaan kegiatan pemberdayaan di lembaga ini juga melalui 3 tahapan yaitu pembentukan kesadaran, kegiatan pengkapisitan dan pendayaan. Pembentukan kesadaran di MTs. Ma'arif Mungging Pulung dipengaruhi oleh faktor eksternal, yaitu kenyataan bahwa sebagian besar wali murid di MTs. Ma'arif Mungging berasal dari kaum abangan. Walaupun demikian, mereka berharap anak-anaknya rajin dan patuh menjalankan ajaran Islam dan kelak ketika mereka meninggal dunia didoakan oleh anak-anaknya yang sekolah di MTs. Ma'arif Mungging. Faktor internal yang mempengaruhi pembentukan kesadaran di MTs. Ma'arif Mungging adalah kesadaran para guru di lembaga ini untuk mewujudkan lembaga pendidikan Islam tingkat menengah pertama yang dapat mawadahi potensi peserta didik kaum muslim yang berada di daerah pinggiran sebelah timur kabupaten Ponorogo, yang sebagian besar wilayahnya daerah pegunungan.

Kegiatan pemberdayaan yang kedua adalah pengkapisitan. Pengkapisitan di MTs. Ma'arif Mungging berhubungan de-

ngan pengkapisitan sumber daya manusia, pengkapisitan organisasi dan pengkapisitan nilai-nilai. Kegiatan pengkapisitan sumberdaya manusia di lembaga ini dilakukan melalui kegiatan workshop dan training. Kegiatan ini dilakukan bekerja sama dengan Forum Komunikasi Madrasah Tsanawiyah Swasta Kabupaten Ponorogo. Selain itu dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia di MTs. Ma'arif Mungging juga bekerja sama dengan lembaga lain seperti SMP Islam Sunan Averus Yogyakarta. Kerja sama dengan SMP Islam Sunan Averus Yogyakarta dilakukan sebagai upaya untuk *modeling* kelas unggulan yang diselenggarakan di MTs. Ma'arif Mungging. Pengkapisitan organisasi dilakukan dengan membuat struktur yang sesuai dengan kondisi MTs. Ma'arif Mungging yang di dalamnya terdapat program kelas unggulan dan asrama pondok bagi peserta didik yang berasal dari luar daerah. Setelah penyusunan struktur organisasi selesai maka dilengkapi dengan tugas pokok dan fungsinya. Harapannya dengan demikian MTs. Ma'arif Mungging sebagai sebuah organisasi dapat berjalan dengan baik. Pengkapisitan yang ketiga adalah pengkapisitan nilai-nilai. Nilai-nilai yang dimaksud dalam kegiatan ini adalah nilai-nilai yang dijadikan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan di MTs. Ma'arif Mungging. Di antara nilai-nilai yang dapat dikonstruksi di MTs. Ma'arif Mungging adalah menjadikan ulama' sebagai teladan atau *role models* bagi peserta didik, melestarikan tradisi lama yang baik dan mengambil hal yang baru yang lebih bermanfaat, menjalin kerja sama, memperkuat rasa iman dan taqwa kepada Allah SWT. Penanaman nilai-nilai di MTs. Ma'arif Mungging dilakukan melalui kegiatan pembiasaan praktek beribadah di lingkungan madrasah, membangun budaya madrasah yang komunikatif melalui kegiatan *outdbond* dan shilaturrahi antar guru.

Kegiatan pemberdayaan yang ketiga adalah pendayaan. Kegiatan pendayaan yang terjadi di MTs. Ma'arif Mungging berkaitan dengan pelaksanaan kelas unggulan berasrama. Melalui kegiatan ini, MTs. Ma'arif Mungging berupaya mengembangkan peserta didik yang berprestasi melalui program kelas unggulan. Peserta didik yang masuk kelas unggulan, mereka mendapatkan porsi belajar yang lebih banyak dibandingkan kelas reguler.

Sebagai contoh, peserta didik mendapat kegiatan *taqrar* untuk mata pelajaran yang di UAN-kan. Hasilnya lulusan angkatan pertama kelas unggulan dari madrasah ini ada yang diterima untuk melanjutkan sekolah di SMAN 2 Ponorogo, MAN I Ponorogo, MAN 2 Ponorogo dan MAN Tamberas Jombang. Dari kasus kelas unggulan di MTs. Ma'arif Mungging dapat dijelaskan bahwa budaya akademik yang ditradisikan dan dibiasakan pada peserta didik akan menghasilkan *out-put* yang berkualitas.

Setting penelitian yang ketiga yaitu madrasah aliyah (MA) Ma'arif Al-Azhar Carangrejo. Pada lokasi penelitian ini diperoleh gambaran, bahwa melaksanakan pemberdayaan madrasah juga melalui 3 proses sebagai berikut; (1) pembentukan kesadaran; (2) pengkapasitasan dan (3) pendayaan. Pembentukan kesadaran pada madrasah ini di dorong adanya faktor eksternal bahwa masyarakat di sekitar desa Carangrejo, sebagian besar bekerja di sektor pertanian dan perkebunan di pinggiran hutan jati. Sebagian masyarakat muslim di desa Carangrejo dan sekitarnya dapat melanjutkan studi pada lembaga pendidikan menengah atas yang berciri khas agama Islam yang dapat menampung anak-anak mereka. Mereka berharap, dengan sekolah di madrasah aliyah Al-Azhar Carangrejo, anak-anak mereka mempunyai mempunyai bekal pengetahuan agama Islam yang mencukupi. Kebiasaan yang baik dan memiliki ketrampilan fungsional. Karena sebagian besar peserta didik yang telah tamat sekolah di MA Al-Azhar Carangrejo, yang tidak bisa melanjutkan pendidikan pada perguruan tinggi, lebih memilih membantu orang tua mereka dengan bekerja menjadi buruh migran di luar negeri atau bekerja di kota besar seperti Surabaya atau Jakarta. Kenyataan inilah, yang memberikan kesadaran internal pimpinan madrasah aliyah Al-Azhar Carangrejo untuk membekali peserta didiknya dengan kepribadian yang tangguh dan *life skill* yang memadai agar hal tersebut dapat dimanfaatkan peserta didik MA Ma'arif Al-Azhar Carangrejo ketika kembali ke masyarakatnya.

Untuk menindaklanjuti kegiatan pembentukan kesadaran sebagai bagian dari proses pemberdayaan, maka madrasah aliyah Al-Azhar Carangrejo melakukan kegiatan pengkapasitasan. Pengkapasitasan diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya ma-

nusia, sistem organisasi madrasah dan pengkapasitasan nilai-nilai. Pengkapasitasan sumber daya manusia di madrasah aliyah Al-Azhar Carangrejo dilakukan dengan melakukan kegiatan workshop dan training. Kegiatan workshop difokuskan pada kegiatan keterampilan mengajar guru di kelas bekerja sama dengan perguruan tinggi dan MGPM, kegiatan pengembangan *life skill* untuk peserta didik dengan memanfaatkan potensi lokal yang tersedia di sekitar desa Carangrejo, seperti pelatihan budi daya jangkrik, pembuatan pakan kambing dari pohon pisang, budidaya ikan lele, bertani, menyetir mobil dan sablon.

Untuk memperkuat pemahaman peserta didik di luar materi yang bersifat akademik, maka peserta didik di madrasah aliyah Al-Azhar Carangrejo diberikan pendampingan oleh guru mereka, melalui kegiatan pendayaan. Melalui kegiatan ini peserta didik di madrasah aliyah Al-Azhar diharapkan mempunyai ketrampilan fungsional, sehingga setelah mereka selesai sekolah dapat berusaha secara mandiri, dapat mengembangkan ketrampilan fungsional dasar yang diperoleh selama belajar di madrasah aliyah Al-Azhar Carangrejo.

Modal sosial madrasah di lingkungan LP Ma'arif Ponorogo

Pembahasan modal sosial pada awalnya digunakan untuk menjelaskan hubungan timbal balik dan sistem sosial. Hubungan timbal balik tersebut melahirkan berbagai relasi sosial yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan dalam dinamika kehidupan individu maupun organisasi. James Coleman dalam Field (2008, p. 369) mendefinisikan modal sosial sebagai kumpulan sumber yang melekat dalam relasi keluarga dan dalam organisasi sosial yang bermanfaat untuk pengembangan kognitif dan perilaku sosial bagi anak-anak maupun pemuda. Sementara itu menurut Robert Putnam dalam Field (2010, p. 51) modal sosial bagian dari kehidupan jaringan-sosial norma dan kepercayaan yang mendorong partisipasi dalam sebuah kelompok masyarakat bertindak secara bersama secara lebih efektif untuk mencapai tujuan bersama.

Sedangkan Pierre Bourdieu dalam Field (2010, p. 23) menyatakan bahwa modal sosial adalah sumber daya aktual atau maya yang terkumpul pada individu atau kelompok

karena memiliki jaringan yang tahan lama berupa hubungan timbal balik melalui pengenalan atau pengakuan yang sedikit banyak hubungan tersebut terlembagakan atau terinstitusionalisasikan. Dalam pandangan Bourdieu, modal sosial merupakan produk akumulasi kerja yang membutuhkan koneksi. Solidaritas dalam jaringan mungkin terjadi karena keanggotaan di dalamnya meningkatkan keuntungan baik keuntungan materiel maupun keuntungan simbolik.

Berbeda dengan Bourdieu, Robert Putnam dalam Field (2010, p. 68) menyatakan bahwa modal sosial ada yang bersifat mengikat, ada yang bersifat menjembatani dan ada pula yang bersifat menghubungkan. Modal sosial yang mengikat (*bonding*) adalah modal sosial yang memberikan ikatan antar orang dalam situasi yang sama seperti keluarga dekat, teman dekat, teman akrab dan rukun tetangga. Modal sosial yang menjembatani (*bridging*) adalah modal sosial yang mencakup ikatan yang lebih longgar dari beberapa orang, seperti teman jauh dan rekan kerja. Modal sosial yang menghubungkan (*linking*) adalah modal sosial yang menjangkau orang-orang yang berada dalam situasi yang berbeda-beda, seperti mereka yang berada di luar komunitas sehingga mendorong anggotanya untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia di dalam komunitas.

Dari gagasan tentang modal sosial yang disampaikan oleh Bourdieu, Coleman dan Putnam, dapat dijelaskan bahwa macam-macam modal sosial dapat dibedakan sebagai berikut; 1) nilai-nilai atau norma; 2) jaringan (*networking*) dan; 3) kepercayaan (*trust*) dalam struktur masyarakat.

Nilai-nilai yang diyakini oleh individu ataupun sekelompok masyarakat, baik nilai yang berhubungan moral keagamaan atau moral yang berhubungan dengan kebiasaan atau budaya yang berlaku di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat dapat dikategorikan sebagai modal sosial. Nilai-nilai ataupun norma yang dapat dikategorikan sebagai modal sosial merupakan nilai-nilai yang disepakati secara bersama oleh sebuah komunitas masyarakat dan ditransformasikan dalam kehidupan mereka yang kemudian dapat membentuk konsekuensi-konsekuensi secara bersama jika dilaksanakan. Jika pelaksanaan nilai dapat berjalan dengan baik maka akan melahirkan penghargaan, sebaliknya jika te-

rdapat pelanggaran akan menghadirkan sanksi atau hukuman.

Jaringan atau *networking* sebagai bagian modal sosial merupakan unsur kerja yang dapat menghubungkan individu maupun kelompok dengan anggota lainnya sehingga sebuah kegiatan dapat berjalan secara efektif dan efisien (Lawang, 2005). Menurut Field (2010, p. 18) jaringan sosial merupakan dasar bagi kohesi sosial karena mendorong orang atau sekelompok masyarakat dapat bekerja sama untuk memperoleh imbal balik. Oleh sebab dalam mengembangkan jaringan menurut Coleman dalam Field (2010, p. 371) membutuhkan nilai-nilai yang sepakati secara bersama oleh individu maupun kelompok yang ingin melakukan kerja sama.

Kepercayaan (*trust*) yang berkembang di masyarakat dapat dikatakan sebagai modal sosial. Kepercayaan dalam konteks ini bisa dimaknai sebagai adanya rasa saling percaya yang timbul dalam sebuah ikatan kerja sama dalam sebuah organisasi. Sebagai contoh penelitian Coleman dalam Field (2010, p. 382) yang menjelaskan adanya masalah dalam proyek pembuatan rumah yang dibangun selama perang Dunia II di sebuah kota bagian timur Amerika Serikat. Dalam proyek pembuatan rumah itu dijelaskan banyak masalah, seperti kontruksi rumah yang jelek, pemipaan yang salah, trotoar yang rapuh dan kerusakan lain sebagainya. Penduduk di perumahan tersebut diorganisir untuk menemui pengembang proyek perumahan dan menyatakan masalah tersebut dapat diselesaikan secara bersama-sama dengan penduduk. Setelah proses dialog selesai, penduduk di sekitar perumahan turut terlibat aktif, bersama-sama dengan pengembang untuk memperbaiki berbagai kerusakan. Dari kasus ini dapat dijelaskan bahwa kerja sama dan rasa saling percaya antara pengembang dan organisasi penduduk dapat digunakan untuk memecahkan masalah sosial yang terjadi.

Mencermati modal sosial madrasah yang menjadi setting dalam penelitian ini dapat dijelaskan bahwa pada kasus yang pertama yaitu madrasah ibtidaiyah (MI) Ma'arif Polorejo dapat dijelaskan bahwa modal sosial yang berkembang di lembaga ini dapat dibedakan menjadi 3; (1) nilai-nilai sosial; (2) jaringan sosial dan ; (3) kepercayaan (*trust*). Nilai-nilai sosial yang dikembangkan di lingkungan MI Ma'arif Polorejo meliputi nilai-

nilai keimanan dan ketaqwaan atau disebut juga nilai religius, nilai keikhlasan, nilai ke-disiplinan, kebersihan, keteledanan, ketertiban, kesehatan, kesejahteraan dan kenyamanan. Nilai-nilai tersebut ditradisikan melalui pembentukan budaya madrasah. Sebagai contoh, untuk mentradisikan nilai-nilai religius, pada setiap hari di MI Ma'arif Polorejo diadakan kegiatan sholat dhuha berjamaah pada pukul 6.45 dan dilanjutkan hafalan surat-surat pendek dalam al-qur'an juz 30. Kegiatan ini bertujuan agar peserta didik di MI Ma'arif Polorejo memiliki kebiasaan disiplin datang ke madrasah tepat waktu dan mempunyai jiwa keagamaan yang baik, karena dibiasakan mengerjakan ibadah di madrasah secara berjamaah. Pada level guru pentradisian nilai-nilai melalui kegiatan anjang sana secara bergantian ke rumah guru dan makan *snack* bersama di kantor madrasah.

Modal sosial yang kedua jaringan sosial. Jaringan sosial di MI Ma'arif Polorejo dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain; posisi geografis, struktur sosial, kreatifitas kepala madrasah dan anggota komite madrasah yang mempunyai latar belakang lintas profesi. Lokasi MI Ma'arif Polorejo yang berada di persimpangan jalan yang menghubungkan terminal Ponorogo dan kabupaten Magetan, menyebabkan lembaga ini mudah diakses. Struktur sosial di desa Polorejo bervariasi dengan latar belakang pekerjaan orang tua murid yang beragam, antara lain; petani, buruh migran, wiraswasta, tukang servis elektronik, sopir bus, PNS, TNI/ Polri dan pengusaha. Kreatifitas kepala madrasah dalam mengembangkan jaringan sosial dapat dilihat dengan keterlibatan kepala madrasah dengan membangun jaringan sesama kepala madrasah melalui kegiatan konsorsium kepala MI di lingkungan LP Ma'arif Ponorogo dan kelompok kerja kepala madrasah di bawah binaan kepala kantor kementerian agama kabupaten Ponorogo. Anggota komite madrasah yang mempunyai latar belakang pekerjaan yang berbeda-beda seperti dosen di STAIN Ponorogo, guru di sekolah negeri, pengusaha dan tokoh masyarakat menyebabkan MI Ma'arif Polorejo dapat memperoleh akses jaringan yang lebih luas. Contoh dari kasus ini adalah dijadikannya MI Ma'arif Polorejo sebagai madrasah mitra oleh Program Studi STAIN Ponorogo kerja sama dengan LAPIS Australia. Melalui kegiatan ini MI Ma'arif Polorejo mendapat-

kan banyak manfaat dalam kegiatan peng-kapasitasan guru melalui berbagai workshop dan pembinaan berkelanjutan dalam meningkatkan mutu pendidikan.

Dalam hal kepercayaan (*trust*) masyarakat kepada MI Ma'arif Polorejo, dapat dilihat dari kontribusi masyarakat sekitar madrasah, dalam membantu menyediakan sarana belajar. Diantara bentuk sumbangan masyarakat tersebut adalah wakaf tanah yang digunakan sebagai tempat belajar, sumbangan padi pada setiap musim panen dan sumbangan tenaga melalui kegiatan kerja bakti dari masyarakat saat lembaga ini membangun ruang belajar.

Pada *setting* penelitian yang kedua yaitu madrasah tsanawiyah (MTs) Ma'arif Mungging dapat dijelaskan bahwa modal sosial di lembaga ini juga beragam, antara lain; nilai-nilai yang diyakini dan dilestarikan di lembaga ini melalui kegiatan pembiasaan dan pembentukan budaya madrasah, seperti nilai keimanan dan ketaqwaan, nilai-nilai kesederhanaan, menghormati ulama, melestarikan budaya lama yang baik dan mengembangkan budaya baru yang lebih baik. Modal sosial yang lain di lembaga ini adalah jaringan sosial. Jaringan sosial di lembaga ini pada awalnya dikembangkan oleh kepala madrasah. Kepala madrasah di MTs. Ma'arif Mungging pada awalnya merupakan figur yang sangat disegani di lingkungan desa Mungging. Selain menjadi kepala madrasah, juga sebagai kepala desa bahkan juga menjadi ulama di desa Mungging. Karena ketokohan itulah, akses jaringan sosial MTs. Ma'arif Mungging dapat berkembang, misalnya pada tahun 2010, MTs. Ma'arif Mungging mendapat bantuan rehab berat ruang belajar dari *Madrasah Educational Development Project* (MEDP). Setelah terjadi pergantian kepala madrasah, pada periode berikutnya MTs. Ma'arif Mungging menyelenggarakan kelas unggulan sebagai strategi untuk meningkatkan mutu pendidikannya. Program kelas unggulan di MTs. Ma'arif Mungging dapat terlaksana, karena jaringan sosial yang dikembangkan kepala madrasah. Melalui sebuah kegiatan kerja sama, antara MTs. Ma'arif Mungging dengan SMP Islam Sunan Averus Yogyakarta yang dipimpin Prof. Yudian Wahyudi, Ph.D, program kelas unggulan di MTs. Ma'arif Mungging menggunakan sistem *boarding school* dan sistem pembelajaran menggunakan

istilah yang digunakan di SMP Islam Sunan Averus, seperti *taqrar* untuk mata pelajaran yang masuk dalam Ujian Akhir Nasional.

Untuk modal sosial yang ketiga, kepercayaan (*trust*) masyarakat terhadap MTs. Ma'arif Mungging dapat dilihat adanya keterlibatan masyarakat dalam membantu menyediakan sarana belajar. Sebagai contoh, ketika jumlah murid di lembaga ini terus bertambah, sementara sarana meja belajar mengalami kekurangan, maka masyarakat melalui organisasi komite dilibatkan untuk mengumpulkan dana pembelian meja belajar.

Pada setting penelitian yang ketiga yaitu madrasah aliyah (MA) Ma'arif Al-Azhar Carangrejo, dapat diperoleh gambaran tentang modal sosial yang dimanfaatkan di madrasah ini, antara lain; nilai-nilai yang diyakini warga madrasah, jaringan sosial dan kepercayaan warga desa Carangrejo terhadap madrasah aliyah (MA) Al-Azhar.

Sebagai lembaga pendidikan yang berciri khas agama Islam pada jenjang pendidikan tingkat atas, kehadiran madrasah aliyah (MA) Al-Azhar Carangrejo sebagai lembaga pendidikan yang membantu masyarakat pedesaan menyediakan pendidikan formal, utamanya masyarakat Carangrejo dan sekitarnya yang sebagian besar berprofesi sebagai petani tadah hujan dan berkebun di pinggiran hutan jati. Nilai-nilai yang ditransformasikan di lembaga ini adalah nilai keimanan dan ketaqwaan yang ditransformasikan melalui pembiasaan shalat dhuha dan shalat dhuhur berjamaah di lingkungan madrasah, nilai mandiri dan berdikari yang ditransformasikan kepada peserta didik melalui kegiatan pembinaan *life skill* dan kegiatan pramuka. Nilai kebersamaan dan kerja sama yang ditransformasikan melalui kegiatan tahlil dan *istighatsah* yang diselenggarakan selenggarakan di rumah guru secara bergantian. Nilai keikhlasan dan kesederhanaan dengan menjadikan para ulama sebagai teladan dalam mengembangkan budaya madrasah.

Bagian kedua modal sosial di lembaga ini adalah jejaring sosial. Jejaring sosial di madrasah aliyah (MA) Al-Azhar Carangrejo dimanfaatkan untuk kegiatan pengkapasitasan baik yang berhubungan dengan kegiatan akademik maupun non akademik melalui pola kerja sama dengan perguruan tinggi. Diantara kegiatan tersebut adalah kegiatan praktikum pelaksanaan pembelajaran lapangan, pelatihan

dan *workshop* penyusunan perangkat pembelajaran bagi guru. Sedangkan untuk kegiatan nonakademik diantaranya kegiatan pembinaan *life skill* dengan memanfaatkan sumber daya lokal yaitu Gapoktan (Gabungan Kelompok Petani) di desa Carangrejo untuk memberikan pelatihan kepada peserta didik tentang budidaya lele, pembuatan makanan ternak, berwira usaha, berlatih mengemudi mobil.

Modal sosial yang ketiga di madrasah aliyah (MA) Al-Azhar Carangrejo adalah kepercayaan masyarakat di sekitar desa Carangrejo terhadap lembaga ini. Bentuk kepercayaan masyarakat terhadap madrasah aliyah Al-Azhar adalah adanya sumbangan tenaga maupun dana yang diberikan masyarakat dalam menyediakan sarana belajar. Selain itu, peserta didik di lembaga ini dilibatkan sebagai "sinoman" dalam berbagai kegiatan masyarakat, seperti acara pernikahan maupun acara sosial lainnya di masyarakat desa Carangrejo.

Kontribusi Modal Sosial LP Ma'arif Ponorogo terhadap Pemberdayaan Madrasah

Ife & Tesoriero (2014, p. 35) menyatakan bahwa modal sosial dapat dilihat sebagai perekat yang dapat menyatukan masyarakat melalui hubungan antar manusia atau orang untuk melakukan tindakan terhadap sesamanya karena adanya kewajiban sosial, hubungan timbal balik, solidaritas sosial dan adanya hubungan dalam sebuah komunitas. Oleh sebab itu, menurut Jim Ife (2014), modal sosial mempunyai kedudukan yang sama dengan modal-modal lainnya, seperti modal ekonomi dan modal politik.

Hal yang sama juga dijelaskan oleh Coleman dalam Field (2010, p. 32) dalam sebuah penelitian tentang hubungan modal sosial dan prestasi pendidikan di kawasan kumuh Amerika Serikat, dinyatakan bahwa modal sosial tidak terbatas digunakan untuk menunjukkan keadaan komunitas kuat secara ekonomi, tetapi juga dapat digunakan untuk menjelaskan komunitas secara ekonomi. Dalam pandangan Coleman (2010) modal sosial dapat dimanfaatkan untuk merepresentasikan sumber daya masyarakat yang tidak terbatas pada urusan *human capital* dan *economic capital* tetapi juga dapat digunakan untuk menjelaskan jaringan yang dimiliki oleh sebuah komunitas.

Terkait tentang bagaimana hubungan modal sosial dengan kegiatan pemberdayaan madrasah di lingkungan LP Ma'arif Ponorogo, dapat dijelaskan bahwa sebagai lembaga sosial yang bergerak di bidang pendidikan yang bernaung di bawah organisasi sosial keagamaan Nahdlatul Ulama, keberadaan LP Ma'arif sangat diperlukan bagi madrasah yang bergabung dalam wilayah keorganisasiannya.

Peran tersebut utamanya adalah dalam pengarusutamaan nilai-nilai yang ditradisikan di lingkungan Nahdlatul Ulama, antara lain; tasamuh (toleran), tawazun (menjaga keseimbangan), moderat, menjadikan ulama sebagai *role models* (teladan), menjaga tradisi lama yang baik dan mengembangkan hal baru yang lebih bermanfaat melalui proses pembelajaran di madrasah-madrasah yang bergabung dalam organisasi LP Ma'arif.

Selain melalui kegiatan pengarusutamaan nilai-nilai yang ditradisikan di lingkungan Nahdlatul Ulama, LP Ma'arif Ponorogo mempunyai peran penting untuk mewujudkan pendidikan berbasis masyarakat yang demokratis dan membangun kesadaran pentingnya masyarakat akar rumput (*grass root*) NU dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Oleh sebab itu peningkatan kualitas pendidikan madrasah di wilayah binaan LP Ma'arif Ponorogo sangat diperlukan, utamanya dalam membuka dan memperluas jaringan kerja sama dengan berbagai instansi baik di dalam negeri maupun instansi di luar negeri, pemerintah maupun swasta.

Upaya-upaya yang telah dilakukan LP Ma'arif Ponorogo dalam kegiatan pemberdayaan madrasah yang ada dalam wilayah binaannya, antara lain; melakukan pengarusutamaan nilai-nilai ahlu sunnah wal jamaah melalui muatan kurikulum lokal, memberikan akses jaringan bagi madrasah untuk kegiatan pengkapasitasan, baik yang berhubungan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia maupun pengkapasitasan fisik madrasah yaitu sarana dan prasarana.

Menurut analisa Granovetter dalam Mudiarta (2009, p. 6) dijelaskan bahwa jaringan sosial yang dimiliki individu maupun kelompok masyarakat dapat berkontribusi bagi efisiensi dan efektivitas pelaksanaan suatu program. Oleh sebab itu, dalam kegiatan pemberdayaan madrasah di lingkungan LP Ma'arif, pemanfaatan modal sosial sangat bermanfaat.

Ditegaskan oleh Granovetter (2009) terdapat empat prinsip yang perlu diperhatikan dalam memanfaatkan jaringan sebagai modal sosial; *pertama*, norma dan kepadatan jaringan (*network density*); *kedua*, lemah atau kuatnya ikatan antar individu atau kelompok; *ketiga*, peran lubang struktur (*structural holes*) yang berada di luar ikatan lemah atau kuat ternyata berkontribusi untuk menjembatani relasi individu maupun kelompok dengan pihak luar; dan *keempat*, interpretasi terhadap tindakan sosial melalui kegiatan ekonomis maupun non ekonomis.

Dalam kaitannya dengan bentuk-bentuk modal sosial di lingkungan LP Ma'arif Ponorogo dapat dijelaskan bahwa kegiatan pemberdayaan di lingkungan LP Ma'arif Ponorogo memanfaatkan modal sosial yang bersifat *bonding* (mengikat) karena memiliki kesamaan ideologi ahlu sunnah wal jamaah, bersifat *linking* (mengait) karena modal sosial yang dikembangkan di lingkungan LP Ma'arif Ponorogo bersifat lintas instansi dan lintas institusi dan bersifat *bridging* (menjembatani) karena modal sosial di LP Ma'arif Ponorogo berkontribusi bagi kegiatan pemberdayaan madrasah yang ada dalam wilayah binaannya.

Kontribusi modal sosial dalam pemberdayaan madrasah di lingkungan LP Ma'arif Ponorogo dapat dijelaskan bahwa jaringan sosial yang dimiliki LP Ma'arif Ponorogo dapat membantu menghubungkan madrasah dengan pihak luar madrasah. Sebagai contoh dalam setting penelitian ini, madrasah ibtidaiyah (MI) Ma'arif Polorejo mendapatkan akses jaringan kerja sama dengan LAPIS Australia dan Program Studi PGMI STAIN Ponorogo, untuk berbagai kegiatan pengkapasitasan melalui workshop dan pelatihan, juga atas rekomendasi yang diberikan LP Ma'arif Ponorogo. Hal yang sama juga terjadi pada madrasah tsanawiyah (MTs) Ma'arif Mungging, madrasah ini mendapatkan bantuan rehab fisik dari *Madrasah Education Development Project* (MEDB) juga atas rekomentasi LP Ma'arif Ponorogo. Untuk kasus madrasah aliyah (MA) Al-Azhar Karangrejo, kontribusi modal sosial LP Ma'arif Ponorogo, baru sebatas pada akses pemberian pengakuan legal formal belum berlanjut pada akses jaringan yang lebih luas.

Oleh karena itu, dalam kegiatan pemberdayaan madrasah di lingkungan LP Ma'arif Ponorogo, kontribusi modal sosial sosial

dalam bentuk jejaring sosial sangat dibutuhkan, tentu tanpa mengabaikan modal modal sosial yang lainnya seperti pengarusutamaan nilai-nilai berbasis kultur NU yang ditradisikan dalam kultur madrasah.

SIMPULAN DAN SARAN

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan madrasah perlu mempertimbangkan kondisi lokal yang terjadi pada masing-masing madrasah. Tidak ada formula yang manjur untuk memberdayakan madrasah secara umum. Meminjam istilah Zamroni (2007), setiap lembaga pendidikan memiliki latar belakang dan potensi masing-masing, yang menyebabkan tidak mungkin dilaksanakan “*one size fits for all policies*”. Tidak ada satupun formula manjur yang dapat dipakai sebagai obat mujarab untuk memecahkan problem yang dihadapi oleh masing-masing lembaga pendidikan.

Oleh sebab itu, pemilihan modal sosial sebagai alternatif untuk pemberdayaan madrasah perlu diawali dengan kegiatan pembentukan kesadaran kritis oleh masing-masing madrasah, bahwa perubahan adalah sebuah keniscayaan yang perlu dilakukan untuk membebaskan madrasah dari ketidakberdayaan. Ketika kesadaran kritis sudah terbentuk maka, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah kegiatan pengkapasitasan (*capacity building*) dengan memanfaatkan modal sosial yang dimiliki madrasah. Ketika kegiatan pengkapasitasan sudah dilakukan maka perlu dilakukan kegiatan pendayaan dengan melakukan kegiatan pendampingan. Dalam konteks inilah peran LP Ma’arif Ponorogo sebagai induk organisasi madrasah dibutuhkan.

Saran

Penelitian ini penelitian etnografi yang membutuhkan kedalaman analisis untuk mengungkap tema budaya yang berhubungan dengan pemberdayaan dan modal sosial di lingkungan LP Ma’arif Ponorogo. Karena adanya keterbatasan peneliti dalam menyajikan data secara mendalam dan keterbatasan peneliti untuk mendialogkan teori modal sosial dan pemberdayaan, maka diperlukan penelitian lanjutan yang lebih mendalam untuk menemukan tema budaya yang lebih detail.

Daftar Pustaka

- Ahid. (2009). *Problematika madrasah aliyah di Indonesia*. Kediri: STAIN Kediri Press
- Azra. (2000). *Pendidikan Islam: Tradisi dan modernisasi menuju milenium baru*. Ciputat: Logos
- Bahrudin. (2008). *Pendidikan qaryah thayyibah*. Jakarta: Kompas
- Creswell. (2013). *Research design (pendekatan kualitatif, kuantitatif dan mixed)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Coleman. (1994). *Foundations of social theory*. Harvard University: The Belknap Press
- Danim. (2005). *Menjadi komunitas pembelajar; kepemimpinan transformasional dalam komunitas organisasi pembelajar*. Jakarta: Bumi Aksara
- Dubois & Miley. (1992). *Social work: An empowering profession*. Boston: Allyn and Bacon
- Jenny & Williams. (2010). *Teori-teori kritis: Menantang pandangan utama studi politik internasional (terj.)*. Yogyakarta: Pustaka Baca
- Emzir. (2008). *Metodologi penelitian pendidikan kuantitatif dan kualitatif: Korelasional, eksperimen, ex post facto, etnografi, grounded theory dan action research*. Jakarta: Rajawali Press
- Emzir. (2010). *Metodologi penelitian kualitatif: Analisis data model bogdan & biklen, model miles & hubermann, model strauss & corbin, model spradley, analisis isi model philip mayring, program komputer nvivo*. Jakarta: Rajawali Press
- Fatah. (2002). *Madrasah di Indonesia: dinamika, kontinuitas dan problematika*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Field. (2010). *Modal sosial (terj.)*. Bantul: Kreasi Wacana
- Forum Mangunwijaya. (2008). *Kurikulum yang mencerdaskan: Visi 2030 dan pendidikan alternatif*. Jakarta: Kompas
- Friedmann. (1992). *Empowerment: The politics of alternative development*. Cambridge: Blackwell Publisher
- Hibana, H., Kuntoro, S., & Sutrisno, S. (2015). *Pengembangan pendidikan*

- humanis religius di madrasah. *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi*, 3(1), 19-30. Retrieved from <http://journal.uny.ac.id/index.php/jppfa/article/view/5922>
- Ife. (1995). *Community development: Creating community alternatives, vision, analysis and practice*. Australia: Longman
- Ife & Tesoriero. (2014). *Community development*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Kotter. (1996). *Leading change*. Massachusetts: Harvard Business School Press
- Kotter, & S. Cohen. (2002). *The heart of change*. Deloitte consulting LLC
- Kuntoro (2010). *Modal sosial dan budaya bagi peningkatan kualitas pendidikan persekolahan*. Yogyakarta: Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta
- Lawang. (2005). *Kapital sosial dalam perspektif sosiologik suatu pengantar*. Jakarta: FISIP UI Press
- Leksono. (2009). *Runtuhnya modal sosial, pasar tradisional: Perspektif emik kualitatif*. Malang: Citra Malang
- Mahfudh. (1994). *Madrasah dari Masa ke Masa, dalam Nunasa Fiqih Sosial*. Yogyakarta: LKiS
- Mardikanto & Soebiato. (2012). *Pemberdayaan masyarakat dalam perspektif kebijakan publik*. Bandung: Alfabeta
- Moleong. (2001). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung. Remaja Rosdakarya
- Mubyarto, ed. (1997). *Kisah-kisah IDT: penuturan 100 sarjana pendamping*. Yogyakarta: 1997
- Mudiarta. (2009) *Jaringan Sosial Dalam Pengembangan Sistem dan Usaha Agribisnis: Perspektif Teori dan Dinamika Studi Kapital Sosial*, (Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, 2009)
- Muhaimin. (2005). *Pengembangan kurikulum agama Islam di sekolah, madrasah dan perguruan tinggi*. Jakarta: Raja-wali Pers.
- Nuryatno. (2008). *Mazhab pendidikan kritis: Menyingkap relasi pengetahuan politik dan kekuasaan*. Yogyakarta: Resist Book.
- Ouchi. (2000). *The secret of TSL: the revolutionary discovery that raises school performance*. New York: Simon & Schuster
- Pranarka & Moeljarto. (1996). *Pemberdayaan (empowering)*. Jakarta: CSIS
- Priyono & Pranarka (Ed.). (1996). *Pemberdayaan: Konsep, kebijakan dan implementasi*, Jakarta: CSIS.
- Sagala. (2008). *Budaya dan reinventing organisasi pendidikan: Pemberdayaan organisasi pendidikan ke arah yang lebih profesional dan dinamis di provinsi, kabupaten/ kota dan satuan pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Sairin. (2001). *Perubahan sosial masyarakat Indonesia perspektif antropologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sergiovanni (1993). *Building community in school*. San Francisco: Jossey-Bass Publisher
- Soetomo. (2011). *Pemberdayaan masyarakat: Mungkinkah muncul antitesisnya?*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Spradley. (2007). *Metode etnografi*. Yogyakarta. Tiara Wacana
- Suharto. (2009). *Membangun masyarakat memberdayakan rakyat: Kajian strategis pembangunan kesejahteraan sosial & pekerjaan sosial*. Bandung: Refika Aditama
- Sumodiningrat. (2007) *Pemberdayaan sosial: Kajian ringkas pembangunan manusia Indonesia*. Jakarta: Kompas
- Tilaar. (2004). *Paradigma baru pendidikan nasional*. Bandung: Rineka Cipta.
- Tilaar. (2006). *Standarisasi pendidikan nasional*. Bandung: Rineka Cipta.
- Tilaar. (2009). *Membenahi pendidikan nasional*. Bandung: Rineka Cipta.
- Wrihatnolo & Nugroho. (2007). *Manajemen pemberdayaan: Sebuah pengantar dan panduan untuk pemberdayaan masyarakat*. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Zamroni. (2007). *Pendidikan dan demokrasi dalam transisi: Prakondisi menuju era globalisasi*. Jakarta: PSAP Muhammadiyah